

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam, Unimal Press, 2013.
- Andasasmita, Komar, *Hukum Apartemen*, Bandung, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Jawa Barat, 1983.
- Anisah, Siti, *Perlindungan kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan Kedua, Total Media, 2008.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001.
- Asser's, C, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Jakarta, Jilid III-Hukum Perikatan, Dian Rakyat, 1991.
- Bagir, Haidar, *Era Baru Manajemen Etis*, Bandung, Mizan, 1995.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, 2007.
- H.S., Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014.
- Khairandy, Ridwan, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016.
- Lontoh, Rudy A., et al, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001.

- M., Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2015.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Pramono, Nindyo dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2017.
- Projodikoro, Wirdjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1991.
- Sanjaya, Umar Haris, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta, NFP Publishing, 2014.
- Sastrawidjaja, Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2006.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta, FH-Utama, 2014.
- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2019.
- Sinaga, Syamsudin Manan, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto*, Jakarta, Grafiti, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 2001.

- Suyatno, R. Anton, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, 1995.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Waluyo, Bernadette, *Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Mandar Maju, 1999.
- Widjaja, Gunawan, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta, Forum Sahabat, 2009.
- Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- Wijayanta, Tata, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2016.
- Wijayanta, Tata, dan Sheva Trisanda Adistia, *Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2023.
- Yuhassarie, Emmy, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Jurnal

Adriansa, M. Zaky, et.al., “Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan”, *Progresif Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2 (Desember 2022): 130-148. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>

Andani, Devi dan Wiwin Budi Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 3 (September 2021): 636-656. https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/17469/11514/54320?cf_chl tk=fkLwXcut_67R.TcOsbGWYLOQ2mx8CabDLbMlo2.vbgs-1723792937-0.0.1.1-7401

Arfiani, Khairul Fahmi, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilla, dan Miftahul Fikri, “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”, *Riau Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (Mei 2022): 48-74, <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7938/6625>

Kheriah, “Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan”. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 2, No. 2 (Januari 2014): 238-257. <https://www.neliti.com/publications/9081/independensi-pengurus-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu-dalam-hukum-kepa>

Putriyanti, Erma Defiana dan Tata Wijayanta, “Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3 (Oktober 2010): 482-497. <https://doi.org/10.22146/jmh.16240>

Sari, Zunita dan Latifa Mustafida, “Tinjauan Hukum Terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli (Studi di Kantor Notaris Ny. Susilowati Achmad, S.H.)”, *Fortiori Law Journal*, Vol. 1, No. 01 (April 2021): 1-22. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/922/960>

Sidharta, Iwan, “Pembuktian Sederhana dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/Pdt.Sus/2016)”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2018): 36-47. <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i1.43>

Silviana, Ana, Khairul Anami, Handojo Djoko Waloejo, “Memahami Pentingnya

Akta Jual Beli (AJB) dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No. 2 (November 2020): 191-195. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.9523>

Suhadi, Endi dan Ahmad Arif Fadilah, “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 7 (Desember 2021): 1967-1978. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1078>

Suwardi, “Kajian Tanggungjawab Hukum *Developer* Akibat Tidak Dibangunnya Kondotel Sesuai Perjanjian”, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 6, No. 2 (Januari 2023): 181-201. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/5317>

Swastiningsih, Rahma Widya dan Endang Prasetyawati, “Kewenangan Menteri.Kuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Bum”, *Bureaucracy Journal*, Vol. 2, No. 1 (April 2022): 641-653. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.158>

Wafi, M. Shafiyuddin, et.al., “Perolehan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Studi di Star Apartemen)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 (Juni 2016): 1-13. <https://ejournal3.undip.ac.id>

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (Mei 2014): 216-226. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291>

Wijayanta, Tata, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1 (Februari 2014): 1-13. <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>

Wijayanta, Tata dan Sheva Trisanda Adistia, “Development of The Heritage Center as Bankruptcy Curator”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 11, No. 1 (Maret 2024): 1-18. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v11i1.34435>

Internet

Azzahra, Farisa Nadhilah, “Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti

Sejahtera (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 383/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, 2023,
<https://repository.unsoed.ac.id/23489/>, (diakses pada tanggal 2 Februari 2024).

Budianto, Valerie Augustine, “Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaanwanprestasi-danperbuatan-melawan-hukum-cl2719/> (diakses pada 15 Agustus 2024).

Dwinanto, Rizky, “2 Syarat Putusan PKPU bisa Diajukan Kasasi”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a/>, (diakses pada 12 Juli 2024).

Heriani, Fitri Novia, “Memahami Konsep Pembuktian Sederhana dalam Sengketa Pailit/PKPU” <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-konsep-pembuktian-sederhana-dalam-sengketa-pailit-pkpu-lt65f1653d00575/?page=all#!> (diakses pada 8 Agustus 2024).

Kementerian Keuangan RI, “Formulasi Surat Gugatan Perdata”,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/15667/Formulasi-Surat-Gugatan-Perdata.html> (diakses pada 15 Agustus 2024)

Kusumasari, Diana, “Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHP dalam Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengesampingan-pasal-1266-dan-pasal-1267-kuhper-dalam-perjanjian-lt4d534a209bbf4/>, (diakses pada 2 Juni 2024).

Otoritas Jasa Keuangan, “Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek”
<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Tata-Cara-Pengajuan-Permohonan-Pernyataan-Kepailitan-dan-Penundaan-Kewajiban-Pembayaran-Utang-Perusahaan-Efek.aspx>, (diakses pada 4 Oktober 2024).

Pasaribu, Andra Reinhard Ronaldo Soritua, “Homologasi dalam Kepailitan Pasca Kreditur Menolak Rencana Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, 2022, <http://repository.uph.edu/45316/>, (diakses pada 30 Maret 2024).

Rahman, Miyanti, “Cara Mengurus Sertifikat Apartemen di Indonesia”,
<https://www.rumah123.com/panduan-properti/membeli-properti-81674-jenis-sertifikat-apartemen-id.html>, (diakses pada 31 Agustus 2024).

RED, “Pelaksanaan Suatu Perjanjian”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian-lt5a5c2fbdae8c4/?page=all#!>, (diakses pada 2 Juni 2024).

Riyanto, Mahmud Hadi dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, “Asas-Asas Putusan Hakim”,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>, (diakses pada 9 Mei 2024).

Rizaty, Monavia Ayu, “Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023)”,
<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>, (diakses pada 5 Desember 2023).

Tesis

Amirrudin, Miranti, *Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi Jual Beli Satuan Rumah Susun Melalui Sistem Pre Project Selling*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Purba, Jasmalin, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kecil Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitor (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines)*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

Sriwijastuti, *Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor*, Tesis, Program studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Skripsi

Kasuma, I Gede Wirya Darma, *Kepastian Hukum Pemilik Satuan Rumah Susun (Apartemen) di Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.

Pratikta, Ari Zia Pratikta, *Wanprestasi Pihak Pengelola Pembangunan Rusunami Terhadap Calon Pemilik mengenai Penyerahan Akta Jual Beli dan Biaya Tambahan di luar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung, 2018.

Lain-lain

Hasil wawancara dengan Bapak Arius Sinaga selaku Advokat sebagai Narasumber di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2024.

Surat Pesanan Pembelian antara Pembeli dengan PT. Funaru Berkah sebagai penjual/developer *The Palace Apartment & Condotel Golden Tulip Essential*.